

**Perilaku Sosial dan Partisipasi Masyarakat
Dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah
di Kabupaten Buleleng**

**Made Adiana ⁽¹⁾
I Nyoman Subanda ⁽²⁾**

*Magister Administrasi Publik, Universitas Pendidikan Nasional ⁽¹⁾
Magister Administrasi Publik, Universitas Pendidikan Nasional ⁽²⁾*

*adiana_id4u@yahoo.com ⁽¹⁾
nyomansubanda@undiknas.ac.id ⁽²⁾*

ABSTRACT

Economic growth in a city has triggered urbanization that brings along concerns on housing and habitation. More people in one area means more waste. An increase of numbers of citizens has changed overall diets and live style in society that contribute to the increase of amount, type, and variation of the waste. Their lack of awareness has caused their ignorance on the importance of a clean surroundings. Throwing waste to the river, for example, is a proof of a poor social behavior in keeping cleanliness of the surroundings. To have proper waste management is one of the ways to cope with this problems. However, it would ask for participations of all parties; government and society itself.

This research aimed at finding and analyzing social behavior and participation of society on the implementation of waste management policy of Buleleng regency.

The method used in this research was a descriptive qualitative. The data was gathered by using observation, interview, and documentation. The data gathered was then analyzed that included data reduction, data presentation, and data verification.

Based on the data analysis, it was found out that society in Singaraja had a poor social behavior in terms of keeping clean surroundings. Even though region rules and regulation number 1 2013 has been made and socialized, waste were still carelessly thrown into the river and most of them paid little attention on the proper time of throwing waste. Since the implementation of the region's rules and regulation on waste management, there was an increase in the citizens' participations. The participation that emerged more often was voluntarily activities of the citizens to clean up surroundings.

Key words: social behavior; participation; waste management

ABSTRAK

Pertumbuhan sektor perekonomian pada sebuah kota memicu timbulnya arus urbanisasi yang pada akhirnya dapat menimbulkan permasalahan pada sektor perumahan dan pemukiman. Semakin banyak penduduk yang bermukim di kota atau suatu daerah, maka semakin banyak pula sampah yang terkumpul. Pertambahan jumlah penduduk, perubahan pola konsumsi, dan gaya hidup masyarakat telah meningkatkan jumlah timbulan sampah, jenis, dan keberagaman karakteristik sampah. Kurangnya kesadaran tentang pentingnya kebersihan lingkungan, menyebabkan mereka kurang peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Pembuangan sampah langsung ke sungai, merupakan salah satu bukti masih rendahnya perilaku sosial masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan adalah dengan mengelola sampah dengan tepat. Namun hal ini tidak dapat dilakukan oleh Pemerintah saja, diperlukan partisipasi masyarakat untuk membantu mencapai tujuan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perilaku sosial dan partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Buleleng.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah data terkumpul dilaksanakan analisis data yang meliputi reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

Berdasarkan data dan hasil analisa yang telah dilakukan diketahui bahwa perilaku masyarakat di Kota Singaraja dalam menjaga kebersihan lingkungan masih rendah. Banyak sampah yang masih dibuang di sungai, tidak pada tempatnya dan tanpa memperhatikan waktu membuang sampah. Padahal mengenai pengelolaan sampah telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 serta telah disosialisasikan kepada masyarakat namun masih banyak masyarakat yang belum melaksanakannya. Seiring dengan diberlakukannya Perda sampah, partisipasi masyarakat dalam mendukung program pemerintah mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya kegiatan kebersihan, gotong royong serta bakti sosial yang dilaksanakan oleh masyarakat. Salah satu bentuk partisipasi masyarakat yang paling besar adalah partisipasi berupa tenaga yaitu dengan melaksanakan kegiatan gotong royong.

Kata kunci : Perilaku social; partisipasi; pengelolaan sampah

PENDAHULUAN

Perkotaan di Indonesia selain berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan sentral hirarki, juga berfungsi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan sektor perekonomian pada sebuah kota memicu timbulnya arus urbanisasi yang pada akhirnya dapat menimbulkan permasalahan pada sektor perumahan dan pemukiman. Dengan bertambahnya jumlah penduduk serta berkembangnya wilayah pemukiman, penyediaan sarana dan prasarana sebagai faktor pendukung berfungsinya sebuah pemukiman juga mengalami pertumbuhan mengikuti perkembangan pemukiman penduduk. Penyediaan sarana dan prasarana pemukiman yang tidak dapat mengimbangi dari pertumbuhan wilayah

pemukiman akan berdampak terhadap munculnya kekumuhan pada wilayah pemukiman tersebut, (Kandoatie,2003:27).

Pertambahan jumlah penduduk, perubahan pola konsumsi, dan gaya hidup masyarakat telah meningkatkan jumlah timbulan sampah, jenis, dan keberagaman karakteristik sampah. Sampah merupakan barang yang dianggap sudah tidak terpakai dan dibuang oleh pemilik/pemakai sebelumnya, tetapi masih bisa dipakai kalau dikelola dengan prosedur yang benar (Basriyanta, 2007). Meningkatnya daya beli masyarakat terhadap berbagai jenis bahan pokok dan hasil teknologi serta meningkatnya usaha atau kegiatan penunjang pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga memberikan kontribusi yang besar terhadap kuantitas dan kualitas

sampah yang dihasilkan. Meningkatnya volume timbulan sampah memerlukan pengelolaan. Pengelolaan sampah yang tidak mempergunakan metode dan teknik pengelolaan sampah yang ramah lingkungan selain akan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan juga akan dapat mengakibatkan polusi. Polusi yang ditimbulkan oleh sampah antara lain polusi air, polusi bau dan polusi tanah (Sejati, Kuncoro.2009). Salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan adalah dengan mengelola sampah dengan tepat.

Untuk mendukung tercapainya tujuan kebijakan pengelolaan sampah melalui ditetapkan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2013, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Buleleng selaku *leading sector* bidang kebersihan dan pertamanan di Kabupaten Buleleng telah menyediakan dan meningkatkan berbagai sarana dan prasarana baik dari segi keuangan, SDM maupun sarana dan prasarana persampahan (kendaraan angkutan sampah, tempat pembuangan sampah, peralatan kebersihan, serta sarana penunjang lainnya). Dari segi keuangan atau dana sebagai bentuk dukungan tercapainya pengelolaan persampahan di Kabupaten Buleleng pada dinas

Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Buleleng mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2015 pagu anggaran sebesar Rp. 31.928.073.700,- meningkat pada tahun 2016 menjadi Rp. 38.097.295.000,-. Dari segi sarana dan prasarana penunjang, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Buleleng didukung oleh armada truk angkutan sampah sebanyak 20 unit yang terdiri dari dump truk sebanyak 7 unit, dan arm roll truk sebanyak 13 unit yang melayani wilayah perkotaan Singaraja dengan jumlah TPS (Tempat Pembuangan Sampah) sebanyak 58 buah dan container sebanyak 40 buah yang disebar di jalan protokol serta tempat-tempat umum di wilayah kota Singaraja.

Menurut Arthur S. Rober, "Perilaku atau tingkah laku adalah sebuah istilah yang sangat umum mencakup tindakan, aktivitas, respon, reaksi, gerakan, proses, operasi-operasi dsb. Pada dasarnya pengelolaan lingkungan tersebut, bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga tanggung jawab masyarakat. Pengikutsertaan masyarakat ini, diperlukan untuk meningkatkan perasaan ikut memiliki (*sense of belonging*) dalam setiap proses kegiatan, disamping itu melalui partisipasi mereka dalam setiap kegiatan, masyarakat mempunyai kesempatan untuk mengembangkan keahlian pribadi,

kepemimpinan dan pertanggungjawaban melalui proses “*learning by doing*”, (Slamet,1993 :45).

Kajian Teoritis

Pengertian Perilaku Sosial

Perilaku sosial adalah aktifitas fisik dan psikis seseorang terhadap orang lain atau sebaliknya dalam rangka memenuhi diri atau orang lain yang sesuai dengan tuntutan sosial. Perilaku juga diartikan sebagai suatu aksi reaksi organisme dalam hal ini manusia terhadap lingkungannya. Perilaku baru terjadi apabila ada sesuatu yang diperlukan untuk menimbulkan reaksi, yakni yang disebut rangsangan yang menghasilkan reaksi atau perilaku tertentu. (Notoatmojdo,1997) perilaku atau aktifitas individu dalam pengertian yang lebih luas mencakup perilaku yang nampak (*over behavior*) dan perilaku yang tidak nampak (*inert behavior*). Perilaku manusia tidak muncul dengan sendirinya tanpa pengaruh stimulus yang diterima baik stimulus yang bersifat eksternal maupun internal. Namun demikian, sebagian besar perilaku manusia adalah akibat respon terhadap stimulus eksternal yang diterima (Bimo,1999:12)

Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku

Perilaku individu dan lingkungan saling berinteraksi yang artinya bahwa

perilaku individu dapat mempengaruhi individu itu sendiri, juga berpengaruh terhadap lingkungan. Adapun secara spesifik faktor lingkungan dan individu adalah sebagai berikut :

a.Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan memiliki kekuatan besar dalam menentukan perilaku, bahkan sering kekuatannya lebih besar dari faktor individu (Azwar,1998:11). Dalam hubungan antara perilaku dengan lingkungan dibagi dalam tiga kelompok, yaitu lingkungan alam/fisik (kepadatan, kebersihan), lingkungan sosial (organisme sosial, tingkat pendidikan, mata pencaharian, tingkat pendapatan) dan lingkungan budaya (adat istiadat, peraturan, hukum) (Sumaatmaja,1998).

b.Faktor Individu

Faktor individu yang menentukan perilaku manusia antara lain adalah tingkat intelegensia, pengalaman pribadi, sifat kepribadian dan motif (Azwar,1998:14).

Pembentukan Perilaku

Pembentukan perilaku sangat diperlukan untuk mengendalikan perilaku manusia agar seperti yang diharapkan (Bimo,1999:18) antara lain dengan :

a.Pembentukan perilaku dengan kondisioning atau kebiasaan, adalah pembentukan perilaku yang ditempuh

dengan mengkondisikan atau membiasakan diri untuk berperilaku seperti yang diharapkan.

b. Pembentukan perilaku dengan pengertian (*insight*), adalah pembentukan perilaku yang dilakukan dengan cara pembelajaran disertai dengan memberikan pengertian.

c. Pembentukan perilaku dengan model atau contoh, adalah pembentukan perilaku dengan menggunakan model atau contoh dan biasanya didasarkan atas bentuk-bentuk perilaku yang telah ada.

Partisipasi

Menurut Juliantara (2002:87) substansi dari partisipasi adalah bekerjanya suatu sistem pemerintahan dimana tidak ada kebijakan yang diambil tanpa adanya persetujuan dari rakyat, sedangkan arah dasar yang akan dikembangkan adalah proses pemberdayaan. Lebih lanjut dikatakan bahwa tujuan pengembangan partisipasi adalah : pertama, bahwa partisipasi akan memungkinkan rakyat secara mandiri (otonom) mengorganisasi diri, dan dengan demikian akan memudahkan masyarakat menghadapi situasi yang sulit serta mampu menolak berbagai kecenderungan yang merugikan. Kedua, suatu partisipasi tidak hanya menjadi cermin konkrit peluang ekspresi aspirasi dan jalan memperjuangkannya, tetapi yang lebih

penting lagi bahwa partisipasi menjadi semacam garansi bagi tidak diabaikannya kepentingan masyarakat. Ketiga, bahwa persoalan-persoalan dalam dinamika pembangunan akan dapat diatasi dengan adanya partisipasi masyarakat (Juliantara,2002:89-90).

Implementasi Kebijakan

Pengertian implementasi kebijakan menurut Nugroho (2003:139) dalam bukunya Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, Evaluasi yaitu : “Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang.”

Hasil yang dicapai dari kebijakan tersebut dapat dilihat setelah kebijakan tersebut diimplementasikan, maka peneliti mengemukakan pengertian pelaksanaan kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Horn yang dikutip oleh Winarno (2008:146) dalam bukunya kebijakan publik : teori dan proses, bahwa implementasi kebijakan mempunyai pengertian sebagai berikut :

Implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-

tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya.

Pengelolaan Sampah

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Kemudian yang dimaksud dengan sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan volumenya memerlukan pengelolaan khusus. Sedangkan menurut WHO, sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya dan bersifat padat.

Pengelolaan sampah adalah semua kegiatan yang dilakukan dalam menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir. Secara garis besar, kegiatan di dalam pengelolaan sampah meliputi pengendalian timbulan sampah, pengumpulan sampah, transfer dan transport, pengolahan dan pembuangan akhir. Secara umum pengelolaan sampah di perkotaan dilakukan melalui 3 tahapan kegiatan, yaitu: pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan akhir. Secara sederhana tahapan-tahapan dari proses kegiatan dalam pengelolaan sampah sebagai berikut:

Pengumpulan diartikan sebagai pengelolaan sampah dari tempat asalnya sampai ke tempat pembuangan sementara sebelum menuju tahapan berikutnya. Pada tahapan ini digunakan sarana bantuan berupa tong sampah, bak sampah, peti kemas sampah, gerobak dorong maupun tempat pembuangan sementara. Untuk melakukan pengumpulan, umumnya melibatkan sejumlah tenaga yang mengumpulkan sampah setiap periode waktu tertentu.

Tahapan pengangkutan dilakukan dengan menggunakan sarana bantuan berupa alat transportasi tertentu menuju ke tempat pembuangan akhir/ pengolahan. Pada tahapan ini juga melibatkan tenaga yang pada periode waktu tertentu mengangkut sampah dari tempat pembuangan sementara ke tempat pembuangan akhir. Pada tahap pembuangan akhir/ pengolahan, sampah akan mengalami pemrosesan baik secara fisik, kimia maupun biologis sedemikian hingga tuntas penyelesaian seluruh proses. Pengelolaan sampah, terutama di kawasan sekolah, dewasa ini dihadapkan kepada berbagai permasalahan yang cukup kompleks. Permasalahan-permasalahan tersebut meliputi tinggi laju timbulan sampah yang tinggi, kepedulian warga sekolah teruma siswa yang masih sangat rendah serta masalah pada kegiatan pembuangan akhir sampah (*final disposal*)

yang selalu menimbulkan permasalahan tersendiri

Metodelogi Penelitian

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di Kabupaten Buleleng, Kota Singaraja.. Alasan pemilihan lokasi ini karena Terdapat variasi tingkat pendidikan, pengetahuan dan sosial ekonomi masyarakat yang memungkinkan adanya variasi perilaku sosial serta tingkat partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah.

Desain Penelitian

Dalam Penelitian ini menggunakan desain Penelitian Kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dalam keadaan atau situasi yang alamiah.

Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan dari proses penelitian disajikan kedalam bentuk kalimat-kalimat. Hasil penelitian kualitatif deskriptif berisi kutipan dari data-data. Data-data tersebut mencakup transkrip wawancara, catatan lapangan, memo, gambar dan lain-lain. Untuk sumber data yang digunakan diantaranya terdiri dari :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian, data yang diperoleh dapat berupa kata-kata dan tindakan yang diperoleh melalui wawancara maupun observasi atau pengamatan langsung di lapangan.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, seperti melalui berbagai sumber bacaan buku-buku, majalah surat kabar, serta dokumen resmi dari instansi pemerintah.

Teknik Analisis Data

Setelah data didapatkan dari lapangan maka tugas peneliti adalah menganalisis data dengan tujuan mengambil hal-hal yang penting dalam menjawab rumusan masalah. Analisis data meliputi tiga unsur (Sugiyono, 2005:341-345) yaitu :

a. *Data reduction* (reduksi data)

b. *Data display* (penyajian data)

c. *Conclusion drawing/verification*

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bahwa sosialisasi Perda No.1 Tahun 2013 sejak diperdakan sudah dilakukan sosialisasi, baik dilakukan melalui tatap muka langsung pada saat dilaksanakan pertemuan di tingkat kecamatan dengan mengundang seluruh kepala desa dan khususnya di kelurahan sosialisasi dilakukan oleh bidang penyuluhan serta

melalui siaran radio dan pemasangan baliho serta banner ditempat umum. perilaku masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya masih kurang. Sehingga perlu adanya sanksi untuk memaksa masyarakat untuk meningkatkan kesadarannya dalam membuang sampah.

Kelurahan sangat mendukung Perda Sampah dengan tetap membuang sampah pada tempatnya, sekaligus tetap melakukan pembinaan walaupun belum berupa sanksi atau denda jika terbukti ada masyarakat yang membuang sampah sembarangan. sistem pembuangan sampah menggunakan sistem kawasan, yaitu dimana sampah yang berasal dari rumah tangga diambil oleh petugas kebersihan menggunakan kereta dorong untuk selanjutnya dibuang ke TPS. Jasa untuk pengambilan sampah ini dikenakan kepada tiap rumah yang ingin dilayani pengambilan sampahnya dengan memberikan upah sukarela.

Setiap tahunnya sampah yang dihasilkan oleh masyarakat terus meningkat berdasarkan dengan tingkat konsumsi masyarakat. Semakin banyak tingkat konsumsi masyarakat semakin banyak pula sampah yang dihasilkan. Paradigma baru dalam mengelola sampah harus dipahami dan diikuti, yaitu bahwa sampah dapat dikurangi, digunakan kembali dan atau didaur ulang atau yang

sering kita kenal dengan istilah 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*). Dengan mengelola sampah mulai dari tahap sampah itu ditimbulkan dari sumbernya maka akan dapat mengurangi beban pengelolaan di kota serta dapat mengefisiensikan biaya serta fasilitas untuk mengelola sampah tersebut.

Menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab bersama, khususnya masyarakat yang ada disekitar lingkungannya. Mereka memiliki peran yang penting dalam menjaga lingkungan serta menciptakan budaya lingkungan yang bersih dan sehat. Dengan lingkungan yang bersih diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang sehat, karena lingkungan yang sehat merupakan kebutuhan bagi semua warga masyarakat yang tinggal disuatu lingkungan. Mengupayakan lingkungan yang bersih, tertib, dan teratur merupakan tugas setiap anggota masyarakat (Dacana,1996:85).

Partisipasi Masyarakat dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Buleleng.

Sampah tidak diproduksi, namun ditimbulkan, oleh karenanya diperlukan metode yang tepat untuk penanganannya. Meningkatnya volume sampah sangat dipengaruhi oleh tingkat konsumsi

masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Mikkelsen (2003:64), partisipasi adalah keterlibatan masyarakat secara sukarela dalam perubahan yang ditentukan sendiri oleh masyarakat. Awal partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengelolaan sampah berawal dari bagaimana cara masyarakat ini mengendalikan timbulan sampah. Masyarakat dapat mengurangi perilaku konsumtifnya dan juga dapat memisahkan sampah mana yang masih dapat digunakan dan sampah mana yang akan dibuang. Sehingga timbulan sampah di TPA dapat berkurang.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah merupakan aspek yang penting dalam pengelolaan sampah. Menurut Ericson (dalam Slamet, 1994:89) bentuk partisipasi masyarakat terbagi atas 3 tahap, yaitu partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan, partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan dan partisipasi masyarakat dalam tahap pemanfaatan.

Partisipasi di dalam tahap perencanaan (*idea planning stage*).

Partisipasi dalam tahap perencanaan dimaksudkan adalah keterlibatan seseorang pada tahap penyusunan rencana dan strategi baik dalam penyusunan anggaran dan kepanitian pada suatu kegiatan. Masyarakat berpartisipasi dengan memberikan saran, usul, masukan dan

kritik melalui pertemuan-pertemuan yang diadakan baik dalam kegiatan formal ataupun non formal. Partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan yaitu dengan menyumbangkan saran, ide serta gagasan dalam pertemuan serta sosialisasi dan penyuluhan masih sangat rendah dilakukan.

Partisipasi di dalam tahap pelaksanaan (*implementation stage*).

Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap pelaksanaan pekerjaan suatu proyek. Masyarakat disini dapat memberikan tenaga, uang ataupun material/barang sebagai salah satu wujud partisipasi pada pekerjaan itu. Partisipasi dalam bentuk tenaga merupakan bentuk partisipasi yang paling banyak dilakukan oleh warga masyarakat.

Tingkat partisipasi masyarakat serta kepedulian masyarakat dalam kegiatan kerja bakti dan gotong royong semakin meningkat, hal ini dibuktikan dengan semakin tingginya permintaan bantuan pengangkutan sampah kepada kantor DKP.

Partisipasi di dalam pemanfaatan (*utilitazion stage*).

Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap pemanfaatan suatu proyek setelah proyek tersebut selesai dikerjakan atau

pemeliharaan sarana dan prasarana berupa peralatan persampahan. Partisipasi masyarakat pada tahap ini berupa tenaga dan uang untuk mengoperasikan dan memelihara proyek yang telah dibangun atau memelihara dan menjaganya.

Hasil pengamatan dilapangan ditemukan bahwa banyak kereta dorong yang merupakan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan kondisinya sudah rusak. Beberapa bagian plat sudah ada yang keropos, sehingga petugas yang biasa menggunakannya untuk mengangkut sampah hanya menggunakan papan sebagai pengganti sementara plat yang berlubang tersebut. Kendala yang dihadapi adalah tidak adanya ketersediaan dana atau uang untuk melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan.

Sarana prasarana yang menjadi bantuan pemerintah yaitu Dinas Kebersihan dan Pertamanan kepada masyarakat melalui Kelurahan memang tidak termasuk dengan biaya pemeliharaan. Ketika sarana dan prasarana berupa kereta dorong, bak sampah, komposter mengalami kerusakan maka tidak menjadi tanggung jawab DKP lagi. Sepenuhnya itu menjadi tanggung jawab pihak penerima bantuan untuk merawat dan memelihara sarana dan prasarana tersebut.

PENUTUP

Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa terkait perilaku masyarakat dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah masih sangat rendah. Hal ini dapat dibuktikan dari perilaku masyarakat dalam mengelola sampah dari tingkat rumah tangga hampir tidak ada yang melakukan pemilahan sampah, banyak masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan dan khususnya masyarakat yang tinggal dipinggir sungai masih banyak yang membuang sampahnya dibantaran sungai. Walaupun telah dilakukan sosialisasi Perda Sampah namun masih banyak masyarakat yang melanggar Perda sampah tersebut. Kebiasaan membuang sampah sembarangan telah membudaya sehingga perlu dilakukan pemahaman serta pendekatan secara bertahap.

Partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah lebih banyak dilaksanakan dalam tahap pelaksanaan yaitu berupa partisipasi tenaga dalam bentuk kegiatan kerja bakti serta gotong royong yang semakin meningkat. Partisipasi dalam tahap perencanaan berupa ide-ide serta saran masih rendah hal ini dilihat dari tingkat kehadiran dalam kegiatan rapat serta sosialisasi terkait pengelolaan sampah yang dilaksanakan di Kelurahan dihadiri

oleh sedikit warga masyarakat. Namun tidak menutup kemungkinan, masukan berupa ide dan saran terjadi pada situasi informal seperti saat dilaksanakan kegiatan gotong royong. Meningkatnya partisipasi masyarakat serta pentingnya perilaku positif dalam manajemen sampah semenjak dari sumbernya akan mempermudah dalam tata kelola persampahan permukiman yang akhirnya memberikan dampak kepada kualitas kebersihan lingkungan permukiman khususnya dan perkotaan pada umumnya

Saran

1. Perlu dilaksanakan sosialisasi serta penyuluhan secara mendalam kepada masyarakat dalam memilah sampah di rumah tangga sebagai sumber sampah utama di perkotaan.
2. Sosialisasi mengenai waktu membuang sampah juga perlu dilakukan secara mendalam serta dilakukan pengawasan, agar pengangkutan sampah dapat terlaksana secara efektif.
3. Pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan di wilayah perkotaan perlu mendapat perhatian, baik bak sampah, container yang mengalami keropos agar segera diperbaiki. Agar sampah yang telah terkumpul tidak berserakan sehingga dapat mengganggu pemandangan dan kebersihan lingkungan disekitar.

4. Perlu dilakukan evaluasi terhadap volume sampah dan kebutuhan bak sampah di beberapa tempat yang mengalami peningkatan volume sampah sehingga sampah dapat tertampung dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, A. (1990). *Pengantar Ilmu Lingkungan*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya.
- Basriyanta. (2007). *Mamanen Sampah*. Yogyakarta: Kanisius.
- Dacana, H.L. (1996). *Pembinaan Disiplin Di Lingkungan Masyarakat Kota*. Nusa Tenggara Barat: Depdikbud.
- Djoyomartono, M. (2004). *Antropologi Kesehatan*. Semarang: UPT UNNES Press.
- Helmi, A F. (1995). *Strategi Adaptasi Yang Efektif Dalam Situasi Kepadatan Sosial*. Tesis. Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Isbandi, R. A. (2007). *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Depok: FISIP UI Press.
- Juliantara, D. (2002). *Menggeser Pembangunan, memperkuat Rakyat*. Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama.

- Kodoatie, R. J. (2003). *Manajemen dan Rekayasa Infrastruktur*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mikkelsen, B. (2003). *Metode Penelitian Partisipatoris dan upaya-upaya pemberdayaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Moleong, L. J. (1993). *Metode Penelitian Kualitatif, Telaah Positivistik, Rasionalistik, Phenomonologi, Realisme Metafisik*. Yogyakarta: Rekha Sarasin.
- Moleong. (2002). *Metode Penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif. Cetakan dua puluh (edisirevisi)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhadjir, N. (2002). *Metode Penelitian Kualitatif. Edisi IV*. Yogyakarta: Rakha Sarasin.
- Notoatmodjo. (1997). *Pengantar Pendidikan Kesehatan dan Ilmu Perilaku Kesehatan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Peraturan Daerah No.1 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah.
- Sarlito, W., Sarwono. (2002). *Psikologi Lingkungan*. Jakarta: Grasindo.
- Sejati, K. (2009). *Pengelolaan Sampah dengan Sistem Node, Sub Point, Center Point*. Yogyakarta: Kanisius.
- Slamet, Y. (1994). *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Slamet, M. (2003). *Membentuk Pola Prilaku Manusia Pembangunan*. Bogor: IPB Press.
- Soedjadi, K. (2005). *Jurnal Kesehatan Lingkungan, II*.
- Soedjono. (1990). *Anatomi Pariwisata Memahami Pariwisata*. Jakarta: Gramedia.
- Soetrisno, L. (1995). *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sudrajat, H. (2007). *Mengelola Sampah Kota*. Jakarta: Swadaya.
- Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sumaatmadja, N. (1998). *Manusia Dalam Konteks Sosial Budaya dan Lingkungan*. Bandung: CV Alfabet.
- Suparmoko. (2000). *Ekonomika Lingkungan*. Edisi I. Yogyakarta: BPFE.
- Walgito, B. (1999). *Psikologi Sosial*. Yogyakarta: Andi.
- Wibowo, I., dan Darwin. (1993). *Faktor-faktor Personal dan Sosial Untuk Mempengaruhi Intensi Kaum Ibu Dalam Pemeliharaan Lingkungan*. Jakarta: LPUI.